

Mendagri Lantik Adhy Karyono sebagai Pj Gubernur Jawa Timur

JAKARTA (IM) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik Adhy Karyono sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur (Jatim) secara hybrid di Gedung SBP, Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (16/2).

Sebelumnya, Adhy Karyono menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim.

"Karena tanggal 14 Februari 2024 itu adalah hari libur dan ada Pemilu, otomatis kita tidak laksanakan di tanggal 14 pelantikannya. Ada tanggal 15 juga tapi saya lihat ada mudah-mudahan menjadi lucky day for us, lucky day hari keberuntungan yaitu hari Jumat, hari ini. Jadi kita laksanakan hari ini, hari yang baik bagi kita semua, mudah-mudahan menjadi awal yang baik juga untuk Bapak Adhy Karyono dan seluruh stafnya nanti," kata Tito dalam keterangan tertulis, Jumat (16/2).

Tito menyebut bahwa Provinsi Jatim memiliki peran yang sangat penting di Indonesia karena menjadi wilayah

dengan populasi terbesar kedua setelah Jawa Barat. Apalagi di dalamnya terdapat 38 kabupaten atau kota.

Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim juga menjadi salah satu pemerintah daerah (Pemda) yang banyak mendapatkan penghargaan dari Kementerian/Lembaga (K/L).

Tito berharap Pj. Gubernur yang baru dilantik dapat meneruskan prestasi-prestasi yang telah dilakukan pemimpin sebelumnya. Apalagi, menurutnya, Adhy Karyono sebagai Sekda Provinsi Jatim selama ini telah menunjukkan pengalamannya di birokrasi.

Menurut Tito, dengan posisinya tersebut, tentunya Pj. Gubernur Jatim dapat mengetahui dan memetakan masalah dengan lebih baik. Tito pun optimistis Provinsi Jatim di bawah kepemimpinan Adhy Karyono akan melanjutkan prestasi yang telah dicapai. ●han

Dituntut 11 Tahun Penjara, Eks Komisaris Wika Beton "Ngamuk" di Ruang Sidang

JAKARTA (IM) - Eks Komisaris Wika Beton, Dadan Tri Yudianto, "ngamuk" di ruang sidang, setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) selesai membacakan tuntutan 11 tahun penjara.

Dadan Tri menjadi terdakwa dalam kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Setelah jaksa selesai membacakan tuntutan jaksa 11 tahun penjara, Dadan Tri tak kuasa menahan emosinya.

Ia langsung menendang pintu pembatas antara kursi terdakwa dengan kursi audiens di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam pembacaan tuntutan, terdakwa Dadan Tri dituntut dengan hukuman 11 tahun 5 bulan penjara oleu jaksa penuntut umum pada KPK.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyelesaikan perbuatan terdakwa itu. Ia pun meminta Majelis Hakim mempertimbangkan perilaku tersebut.

Riris Riska Diana, istri Dadan Tri, yang duduk di kursi pengunjing, juga terlihat histeris saat mendengarkan tuntutan suaminya. Bahkan, Riris melontarkan umpatan kepada jaksa dan KPK.

"Tentu tindakan demikian tidak dapat dibenarkan," ujar Ali saat dihujungi wartawan, Jumat (16/2).

Dadan Tri seharusnya melakukan pembelaan secara hukum. Bukan dengan cara-cara seperti yang mereka lakukan itu.

Sementara itu, Riris Riska Diana histeris saat mendengarkan tuntutan suaminya. Hal itu terjadi ketika sidang pembacaan tuntutan terkait dugaan penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (13/2).

Ketika mendengarkan tuntutan jaksa 11 tahun penjara, Riris yang hadir dengan dres berwarna biru-putih pun tak mampu menahan emosinya. Ia kemudian teriak histeris di dalam ruang sidang yang masih lengkap susunan majelis hakim hingga terdakwa.

"KPK jahat," teriak Riris.

Saat istrinya histeris, Dadan Tri beranjak dari kursi terdakwa. Ia kemudian menendang pintu pembatas kursi terdakwa dengan kursi audiens.

Akibatnya, dua kisi-kisi pintu yang terbuat dari kayu patah setelah ditendang Dadan Tri yang kesal dengan tuntutan jaksa. ●han

FOTO: ANI



REKAPITULASI SUARA PEMILU TINGKAT KECAMATAN DI BALI

Petugas saksi dari parpol mencatat perolehan suara saat mengikuti rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 di tingkat kecamatan di kawasan Abiabsemal, Badung, Bali, Jumat (16/2). KPU Badung memulai tahapan rekapitulasi penghitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kab/kota di tingkat panitia pemilihan kecamatan.

PENGUMUMAN RENCANA PENGAMBILIHAN SAHAM PT BANGUN SARANA SAMUDRA LAUT

Direksi PT Bangun Sarana Samudra Laut, sebuah perusahaan yang berkedudukan di Jakarta ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada seluruh pihak yang berkepentingan bahwa akan dilakukan pengambilalihan baik seluruh saham maupun kepengurusan Perseroan kepada pihak ketiga.

Para pihak yang berkepentingan termasuk kreditor yang keberatan terhadap rencana tersebut, dapat mengajukan keberatannya secara tertulis dalam jangka waktu 14 hari semenjak pengumuman ini diterbitkan, melalui kantor Perseroan, dengan alamat sebagai berikut:

PT Bangun Sarana Samudra Laut
Wisma Tendean Lantai 3, Jl. Kapten Tendean No. 7, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790, Indonesia

Demikian pengumuman ini dibuat dan dipublikasikan dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 127 ayat 2 dan 4 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

17 Februari 2024

Direksi

PT Bangun Sarana Samudra Laut

2 | Polhukam

FOTO: ANTARA



PERESMIAN KAL SEMBULUNGAN DAN KAL HINAKO DI BATAM

Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali (kedua kanan) menyematkan tanda kepangkatan kepada Lettu Laut (P) Riyanto (kiri) sebagai Komandan KAL Sembulungan dan Lettu Laut (P) Heru Kuswanto (kedua kiri) sebagai Komandan KAL Hinako saat Peresmian di PT Citra Shipyard Batam, Kepri, Jumat (16/2). KAL 28 M Sembulungan dan Hinako merupakan produksi kapal dalam negeri yang nantinya akan memperkuat satuan Pangkalan TNI AL (Lanal) Banyuwangi.

Dewas Ungkap, 90 Persen Tahanan KPK Beri Uang Pungli kepada Petugas Rutan

Anggota Dewas KPK Albertina Ho menyebut tidak semua tahanan KPK punya uang banyak sehingga tidak memberi uang pungli ke petugas rutan.

JAKARTA (IM) - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menyebut hampir semua tahanan kasus korupsi yang mendekam di rumah tahanan (Rutan) memberikan uang pungutan liar (Pungli) ke petugas.

Anggota Dewas KPK Albertina Ho mengatakan, para tahanan itu mendekam di Rutan Merah Putih KPK, Gedung KPK lama pada kavling C1, dan Rutan Pomdam Jaya Guntur.

"Yang memberikan siapa? Tahanan-tahanan orang-orang yang pernah ditahan di rutan KPK. Siapa saja, hampir semuanya pernah memberi-

kan di tiga rutan itu ya," ujar Albertina kepada wartawan, Jumat (16/2).

Meski demikian, Albertina menyatakan bahwa pihaknya tidak mengungkap daftar tahanan yang memberikan uang kepada petugas rutan untuk menyelundupkan handphone dan fasilitas lainnya.

Sebab, kata Albertina, Dewas hanya mengusut perkara etik dengan subjek hukum pegawai KPK.

"Kami tidak mengadili yang memberikan, sehingga yang tahanan-tahanan memberikan tidak masuk di dalam putusan," kata Albertina.

Dalam sidang pembacaan

putusan kemarin, di antara tahanan yang disebut memberikan uang kepada petugas adalah orang kepercayaan mantan Bupati Pemalang, Adi Jumal Widodo dan eks Pejabat Kementerian Keuangan, Rifa Surya.

Albertina menyebut, tidak semua tahanan KPK yang memberi uang pungli. Sebab beberapa di antaranya tidak punya uang. Ia menegaskan, tidak semua tahanan korupsi memiliki banyak harta karena mereka hanya berprofesi sebagai pegawai alih daya (*outsourcing*) atau ajudan pejabat yang korup.

"Misalnya hanya yang sebagai ajudan yang adalah belum sebagai pegawai negeri hanya pegawai *outsourcing* dan sebagainya itu kan ada juga yang ditahan kan?" kata Albertina.

"Nah itu ada yang tidak memberikan tapi sebagian besar ya bisa kita katakan lebih

dari 90 persen memberikan," tambah Albertina.

Sebagai informasi, pada Kamis (15/2), Dewas KPK membacakan putusan sidang etik 90 pegawai Rutan KPK yang terlibat pungli. Perkara mereka dibagi menjadi 6 kluster yang berbeda-beda. Namun, secara umum materi perbuatan mereka sama yakni penerimaan uang menyangkut pemberian fasilitas kepada para tahanan korupsi.

Jumlah uang yang diterima para petugas rutan itu bervariasi, mulai dari jutaan, puluhan juta, hingga Rp 425 juta dalam kurun waktu yang berbeda. Dewas kemudian menjatuhkan sanksi etik berat kepada 78 pegawai berupa permintaan maaf secara terbuka.

Sementara, perkara 12

orang lainnya diserahkan ke Sekjen karena perbuatan mereka dilakukan ketika Dewas KPK belum dibentuk.

Kasus dugaan pungli ini ditemukan Dewas KPK dengan temuan awal mencapai Rp 4 miliar per Desember 2021 hingga Maret 2023. Transaksi panas itu diduga terkait penyelundupan uang dan alat komunikasi untuk pemberian kasus korupsi dan terindikasi suap, gratifikasi, serta pemerasan.

Setelah melakukan rangkaian pemeriksaan etik, Dewas KPK menyebut jumlah uang pungli di Rutan KPK mencapai lebih dari Rp 6 miliar lebih dalam rentang waktu 2018-2023. Adapun 3 pegawai KPK diadwalkan menjalani sidang pada 16 Februari. ●han

KPU Koreksi Publikasi Anies Dapat 3 Juta Suara di 1 TPS, Tepis Isu Turunkan

JAKARTA (IM) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan tidak menurunkan perolehan suara pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, seperti yang dituduhkan di media sosial. KPU menyebut penurunan suara Anies karena koreksi data perolehan suara Anies Baswedan yang mulanya diinput 3 juta suara di salah satu TPS di Lampung.

"Pada kesempatan ini perlu kami jelaskan isu yang viral dan sudah mengarah pada disinformasi di mana KPU diumumkan telah menurunkan perolehan suara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden No. urut 1 sebesar 3.514.580 suara. Penurunan angka data suara yang terpublikasi dalam Sirekap tersebut, itu diakibatkan dari adanya koreksi data perolehan suara di TPS 006 Kelurahan Kota Dalam, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung," kata Idham.

Idham kemudian membenarkan data publikasi Sirekap pada 15 Februari pukul 18.30 WIB. Perolehan suara Anies-Cak Imin di TPS 006 mulanya dituliskan 3 juta suara.

"Dalam publikasi Sirekap pada tanggal 15 Februari 2024, 18.30.23 WIB yang di mana Sirekap memublikasikan data paslon pilpres di TPS 006 tersebut sebagai berikut. Paslon 1 memperoleh 3.514.615 suara, paslon 2 memperoleh 415 suara, paslon 3 memperoleh 315 suara," kata Idham sembari menyertakan tangkapan layar publikasi Sirekap yang beredar di kalangan netizen.

Atas publikasi 3 juta suara Anies-Cak Imin hanya di satu TPS, KPU memerintahkan operator Sirekap KPU daerah setempat untuk melakukan koreksi data. Data sebenarnya, kata Idham, yaitu pasangan nomor urut 1 mendapatkan 35 suara di TPS 006 tersebut, diikuti pasangan nomor urut 2 yang mendapatkan 146 suara dan pasangan nomor urut 3 dengan 15 suara. ●mei

Faktor Jokowi dan Kesukaan Menjadi Penentu Kemenangan Prabowo-Gibran

JAKARTA (IM) - Hasil perhitungan cepat atau quick count LSI Denny JA, pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul satu putaran di angka 58,47 persen.

Pendiri LSI, Denny JA mengungkapkan alasan Prabowo-Gibran bisa menang satu putaran saja tanpa harus melakukan suap kecurangan yang masif, sistematis dan terstruktur.

Menurutnya faktor tingkat pengenalan dan kesukaan total pemilih kepada Prabowo dan Gibran menjadi kunci. Pada survei terakhir LSI Denny JA itu (Feb 2024), Prabowo dan Gibran dikenal dan disukai pada puncaknya. Dua tokoh ini mencapai status variabel elektabilitas kelas premium.

"Variabel elektabilitas itu terminologi untuk kondisi pembentuk elektabilitas.

Yaitu tingkat pengenalan dan tingkat kesukaan. Yang mengenal Prabowo dan Gibran sudah di atas 90 persen populasi Indonesia. Dan yang menyukai Prabowo dan menyukai Gibran juga di atas 80 persen," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (16/2).

Dengan variabel elektabilitas premium itu, menurut Denny JA tak diperlukan kecurangan yang masif, terstruktur dan sistematis untuk menang telak satu putaran saja.

"Mengapa saya yakin pascaelection ini walaupun begitu banyak protes, politik nasional akan baik-baik saja? Tak akan terjadi kerusuhan model 1998? Ini bisa diprediksi cukup dengan dua indikator. Pertama tingkat kepuasan, approval rating publik kepada Jokowi," tambahnya.

Sejak bulan Juni 2023 hingga Februari 2024, approval rating Jokowi, kepuasan publik pada Jokowi berkisar

antara 75-82 persen.

"Itu karena mayoritas publik puas pada Jokowi," katanya.

Meski begitu walaupun ada kritik di sana dan di sini, kritik itu tak akan meluas membuat kegelisahan yang masif model 1998.

"Tapi satu hal yang harus juga kita katakan. Kritik, keaksian dan protes dari teman-teman intelektual, akademisi, para guru besar, itu berharga untuk direnungkan. Itu semua bagian yang penting dari civic education. Itu semua menu yang dibutuhkan untuk pematangan demokrasi," ucapnya.

Dua paslon rival Prabowo-Gibran yaitu pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) 24,99%, dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud MD 16,56%. Dengan data itu, Prabowo-Gibran disimpulkan LSI Denny JA menang Pilpres 2024 dalam satu putaran. ●han

FOTO: ANI



BUPATI SIDOARJO PENUHI PANGGILAN KPK

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (tengah) usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/2). Bupati Sidoarjo tersebut memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kab. Sidoarjo.